

**MODAL SOSIAL DAN KEGIATAN EKONOMIS SUBAK:  
Kasus di Subak Kedua, Kota Denpasar**

**Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc.,M.M.A**

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Dwijendra

**Abstrak**

Tantangan ke depan bagi pembangunan pertanian di Bali adalah terwujudnya kelembagaan subak dengan kearifan lokalnya mampu menjadi organisasi yang bersifat sosio-agraris-religius yang dapat beradaptasi dengan tuntutan ekonomis anggotanya seiring dengan program-program pembangunan pertanian dan pedesaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan ekonomis di tingkat subak dan menggambarkan elemen-elemen modal sosial yang berperan dalam kegiatan ekonomis subak. Lokasi penelitian dipilih secara purposive di Subak Kedua, Denpasar. Sampel diambil secara acak sebanyak 20 petani untuk memperoleh data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Serba Usaha Subak Kedua yang beranggotakan 61 orang memiliki beberapa kegiatan ekonomis yaitu (i) penyediaan sarana produksi; (ii) pinjaman kredit kepada anggota; dan (iii) kemitraan usaha dengan pihak lain. Elemen-elemen modal sosial pada Subak Kedua terdiri dari tiga dimensi utama yaitu kepercayaan, norma, dan jaringan sosial. Rasa saling percaya di antara anggota subak terlihat pada pengelolaan bisnis di tingkat subak yang didasarkan atas norma-norma (*awig-awig*). Subak Kedua juga memiliki jaringan sosial dengan pihak lain dalam pengelolaan irigasinya dan kegiatan-kegiatan ekonomis subak. Dapat disarankan agar dilakukan pembinaan yang semakin intensif dalam pengembangan agribisnis di tingkat subak seperti aspek manajemen, administrasi dan usaha-usaha bisnis yang menguntungkan bagi petani dan lembaga subak. Selain itu, diperlukan adanya tambahan modal usaha bagi koperasi sehingga para anggota dapat memperoleh kredit yang lebih tinggi.

Kata kunci : Modal sosial, subak, pertanian, koperasi

**Abstract**

The future challenge for Bali agricultural development is how to have subak as a social-agrarian-religious institution with its local wisdom could adapt to economic demand of members in line with the agricultural and rural development. The objectives of this research are to portrait the economic activities at the subak level and to describe the elements of social capital which have role in the economic activities. Subak of Kedua in Denpasar city was purposively selected. There were randomly 20 farmers selected as samples to get data by using interview, observation and documentation techniques. Data were analyzed by employing descriptive method.

Result of research pointed out that the subak cooperative membering 61 farmers has several economic activities. These are (i) provision of agro inputs; (ii) credit for members; (iii) business partnership with the others. The elements of social capital in Subak of Kedua consist of trust, norm and social networking. Mutual trust among members of subak was found on the business management based on the norms (*by-laws*). Subak has also networking with the others for doing irrigation and business management. It is suggested to have intensive subak strengthening on the aspects management, administration and business which might bring profit to subak and farmers. Aside from this, it is needed to provide capital to cooperative in order that farmers could get bigger loan.

Keywords: Social capital, subak, agriculture, cooperative

## 1. PENDAHULUAN

Pengembangan aktivitas ekonomi pedesaan melalui sistem agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan desentralistis merupakan salah satu tujuan pembangunan pertanian di Indonesia (Fatah, 2006). Pembangunan pertanian dilakukan melalui pemberdayaan kelembagaan pada sentra produksi pertanian (Arifin, 2005). Hasil implementasi pembangunan pertanian dan pedesaan di Indonesia belum memberikan hasil yang maksimal (Suryana, 2005). Terdapat beberapa kekeliruan dalam pembangunan pertanian seperti marjinalisasi konsep kelembagaan lokal; lemahnya pelibatan dalam pemanfaatan organisasi lokal yang telah ada; dan ketidakpercayaan terhadap masyarakat lokal (petani) sebagai sumber ilmu dan teknologi (Syahyuti, 2007; Fatah,

2006; Chambers, 1983). Oleh karena itu, diperlukan adanya pemberdayaan kelembagaan lokal dalam pencapaian tujuan pembangunan pertanian (Elizabeth, 2007).

Di Bali, keberadaan subak sangat signifikan dalam pembangunan pertanian khususnya di lahan sawah. Pemberdayaan terhadap subak menjadi bagian yang penting untuk mendorong partisipasi para petani anggota dalam program-program pembangunan. Jika tidak, maka akan mengakibatkan ketidakberhasilan pengembangan agribisnis di perdesaan pada organisasi petani termasuk subak, dimana partisipasi dan kreatifitas masyarakat petani menjadi tidak tumbuh secara berkelanjutan (Hartono, 2009; Sahyuti, 2007; dan Pranadji, 2003).

Tantangan ke depan adalah terwujudnya kelembagaan subak dengan kearifan lokalnya mampu menjadi organisasi yang bersifat sosio-agraris-religius yang dapat beradaptasi dengan tuntutan ekonomis anggotanya seiring dengan program-program pembangunan pertanian dan perdesaan. Orientasi ekonomis ini--kelembagaan irigasi petani (termasuk subak) yang dikembangkan menjadi organisasi yang tidak saja berorientasi pada pengelolaan irigasi tetapi juga pada bisnis--telah banyak digagas terutama di dalam menghadapi era kesejagatan sehingga para petani anggota subak dapat meningkatkan pendapatannya dan sekaligus mampu mengantisipasi terjadinya penyusutan lahan sawah yang tidak terkendali (Sutawan; Suamba; Sedana; Ambarawati: dalam Pitana dan Setiawan, 2005). Memang pada kenyataannya di beberapa negara sudah ada organisasi irigasi yang mampu berperan ganda yakni selain sebagai pengelola irigasi juga mampu mengelola kegiatan berbagai usaha ekonomi seperti terdapat pada beberapa organisasi irigasi di India dan Bangladesh. Adapun kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh organisasi irigasi di Gujarat India, misalnya meliputi: pengadaan sarana produksi pertanian; perkreditan; pemasaran hasil-hasil pertanian; pengolahan pasca panen; dan pemberian pelayanan penyuluhan pertanian (Shah and Shah, 1994).

Dalam upaya pengembangan kegiatan ekonomis di tingkat subak, Dinas Pertanian dan Hortikultura dan juga Dinas Koperasi dan PKM Kota Denpasar secara intensif memberikan pembinaan kepada Subak Kedua untuk membentuk koperasi tani, yaitu pada tahun 2004. Koperasi yang terbentuk adalah Koperasi Serba Usaha (KSU) Subak Kedua. Ijin operasional KSU Subak Kedua berdasarkan pada Badan Hukum No. 94/505/BH.Diskop/PKM.27 Juli 2004. Subak dibentuk selain sebagai organisasi sosial-agraris dan religius juga diharapkan menjadi suatu lembaga yang berperan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi anggotanya dan mendukung perekonomian perdesaan. Seluruh program pembangunan pertanian dilaksanakan melalui kelembagaan ini. Jikapun suatu program membutuhkan kelembagaan baru, maka tetap digunakan subak sebagai basisnya. Transformasi modernisasi dalam aspek pertanian (teknis dan ekonomis) yang dilakukan tidak harus menghilangkan nilai-nilai yang telah dimiliki oleh lembaga subak sebagai lembaga lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan ekonomis di tingkat subak yang dilandasi oleh sistem subak, dan menggambarkan elemen-elemen modal sosial yang berperan dalam kegiatan ekonomis subak.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan pada Subak Kedua di Kota Denpasar, di Provinsi Bali yang dipilih secara purposif dengan pertimbangan bahwa Subak Kedua merupakan subak yang telah melakukan kegiatan usaha ekonomis. Subak Kedua masih tetap mampu mempertahankan luas lahan sawahnya di tengah-tengah serbuan pembangunan permukiman dan perumahan termasuk industri. Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini meliputi data

primer dan data sekunder seperti usaha-usaha ekonomis yang dilakukan. Pada penelitian ini, dilakukan pengumpulan data/informasi sesuai dengan tujuan penelitian dengan menggunakan beberapa teknik wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur yang telah disiapkan; wawancara mendalam (*indepth interview*) dan partisipatif dengan menggunakan suatu pedoman wawancara (*interview guide*), observasi langsung dan dokumentasi.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh anggota Subak Kedua di Kota Denpasar. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *simple random sampling*, dengan pertimbangan bahwa tingkat homogenitas populasi adalah sama, yaitu mereka memiliki kesempatan untuk melakukan usahatani yang sama melalui satu sumber irigasi. Adapun jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 20 petani. Selain sampel petani, juga dilakukan pengambilan *key informants* untuk mendapatkan informasi atau data yang lebih mendalam mengenai aspek tertentu berkenaan dengan tujuan penelitian ini. Adapun mereka yang digolongkan sebagai *key informants* adalah pengurus subak, pengurus Koperasi Unit Desa, pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Pimpinan Dinas Pertanian di tingkat kota dan kecamatan. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan profil subak, kegiatan ekonomis (agribisnis), mengeksplorasi elemen-elemen *social capital* yang terdapat di dalam subak, serta penyesuaian kelembagaan subak dalam kegiatan agribisnis.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Subak Kedua terletak di Desa Peguyangan Kangin dengan ketinggian sekitar 40 m di atas permukaan laut. Keadaan iklim di Subak Kedua tidak berbeda dengan kondisi iklim di wilayah provinsi Bali khususnya yang berada di dataran rendah. Terdapat dua musim yaitu musim hujan dan kemarau dengan bulan basah adalah Desember sampai Maret tetapi kondisi ini mulai bergeser seiring dengan adanya perubahan iklim global. Secara fisik, kondisi wilayah Subak kedua adalah relatif bagus yaitu dapat diakses dengan mudah karena telah dihubungkan oleh prasarana jalan aspal sebagai jalan Kota Denpasar dan menghubungkan antar desa di Kecamatan Denpasar Utara dan Kecamatan Denpasar Timur. Keadaan yang demikian ini sangat mendukung pengembangan agribisnis di wilayah subak mengingat transportasi yang baik akan dapat mewujudkan efisiensi biaya untuk transportasi atau angkutan sarana produksi pertanian maupun produk-produk pertanian. Selain itu, di wilayah Subak Kedua, Desa Peguyangan Kangin telah tersebar berbagai prasarana pasar dan tempat-tempat usaha bisnis lainnya yang mendukung masyarakat lokal termasuk petani anggota subak untuk bertransaksi terhadap produk-produk pertanian maupun non-pertanian.

Subak Kedua memperoleh air irigasi dari Bendung Kedewatan (di Sungai Ayung) dan merupakan salah satu subak yang berada pada wilayah daerah Irigasi Kedewatan. Daerah Irigasi Kedewatan mengairi subak-subak yang berada di dua wilayah yaitu Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar. Secara teknis, jaringan irigasi pada Subak Kedua telah terindikasi baik karena mendapat bantuan dari pemerintah melalui program Rehabilitasi dan Upgrading (R&U) serta proyek tersier baik dari tingkat provinsi maupun Kota Denpasar.

Hingga saat ini, KSU Subak Kedua beranggotakan 61 orang yang anggotanya adalah merupakan anggota Subak Kedua dan juga anggota keluarga petani lainnya. Adapun struktur organisasi KSU Subak Kedua dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Struktur Organisasi KSU Subak Kedua

Seperti diungkapkan di depan bahwa subak di masa mendatang tidak semata-mata melakukan kegiatan pengelolaan irigasi tetapi juga memerlukan adanya peningkatan dan pengembangan kegiatan, yaitu aktivitas ekonomis. Beberapa kegiatan ekonomis yang dilakukan oleh Subak Kedua meliputi: (i) penyediaan sarana produksi; (ii) pinjaman kredit kepada anggota; (iii) pembentukan koperasi tani; dan (iv) kemitraan usaha dengan pihak lain.

Sarana produksi yang disediakan oleh Subak Kedua kepada anggotanya adalah menyediakan benih, pupuk dan pestisida. Salah satu alasan penyediaan sarana produksi melalui subak adalah adanya kebersamaan di antara para anggota subak didalam penentuan jadwal tanam dan pola tanam sekaligus penggunaan jenis/varietas benih yang akan diusahakan, khususnya untuk usahatani padi. Adapun proses penyediaan sarana produksi ini dilakukan bersama-sama di antara petani dan keliahian subak termasuk petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dari Dinas Pertanian dan Hortikultura Kota Denpasar.

Seperti halnya pada subak-subak lainnya di Bali, pada Subak Kedua juga diberlakukan kegiatan usaha ekonomis yang berupa pinjaman kredit kepada petani anggota. Para petani setiap bulan (yaitu saat *sangkepan*) diberikan kesempatan dan hak untuk meminjam uang kas subak. Besarnya pinjaman ditentukan melalui rapat subak, yaitu maksimum Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk jangka waktu setahun dengan tingkat bunga sebesar 1,00 %/bulan. Pada setiap bulan, petani peminjam wajib untuk membayar bunganya dan kemudia pada akhir tahun

seluruh pinjaman pokok wajib dikembalikan. Satu hal yang menarik pada sistem pinjaman di subak bahwa para petani tidak harus menyerahkan agunan sebagai kewajiban dalam peminjaman uang kas subak. Petani yang sedang meminjam uang kas subak tidak diperkenankan untuk menambah pinjamannya karena lebih diutamakan bagi petani lainnya yang memerlukan pinjaman. Namun, apabila tidak ada petani yang meminjam kas subak, maka petani tersebut dapat diberikan kesempatan lagi untuk meminjamnya.

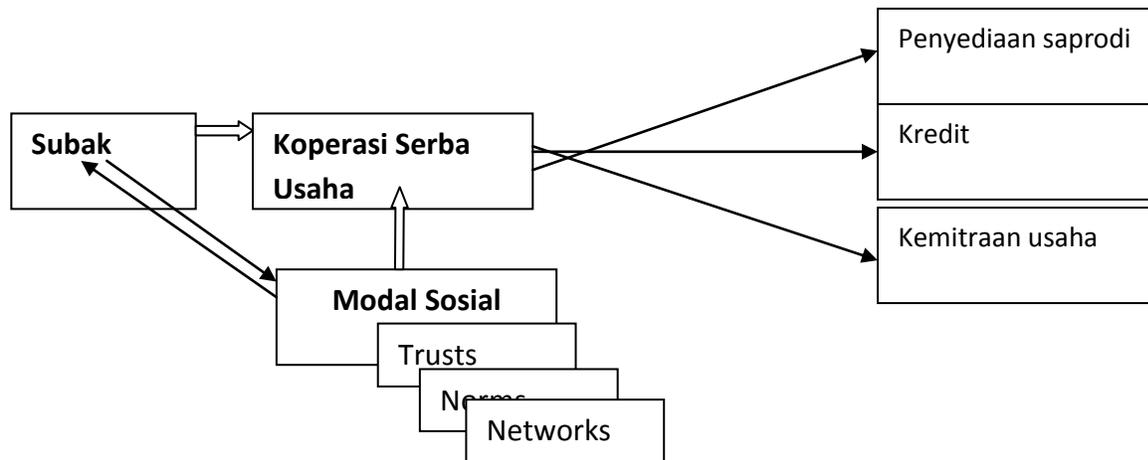
Berdasarkan pada *perarem* subak, bagi petani peminjam yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati bersama, maka akan dikenakan sanksi yaitu pembayaran yang bersifat *nikel*. Apabila sampai beberapa kali petani peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya maka akan berlakunya sanksi yang cukup berat yaitu penutupan air irigasi ke lahan sawahnya. Melalui wawancara dengan petani dan pengurus subak, hingga saat ini belum pernah terjadi pelanggaran yang mengakibatkan penutupan air irigasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sanksi penutupan air irigasi sangat dirasakan berat oleh petani sehingga tidak ada yang melalaikan kewajibannya dalam pengembalian kredit atau hutangnya kepada subak. Pada KSU Subak Kedua, anggota yang hendak meminjam kredit harus melalui proses pengajuan sampai pada proses persetujuannya. Kredit pada KSU Subak Kedua harus disertai dengan agunan sebagai jaminan atas kredit yang dipinjamnya. Pada kasus di atas, jaminan tersebut berupa deposito yang ada di KSU Subak Kedua. Adapun bunga kredit yang diberlakukan adalah 2,7 %/bulan dan dibayarkan selama 10 bulan. Sanksi terhadap pelanggaran pengembalian kredit adalah dengan melelang deposito yang dipakai sebagai agunan.

Guna menjamin keteraturan administrasi dalam pengembalian kredit yang dipinjam oleh anggota, KSU Subak Kedua menyiapkan kartu kredit yang mencatat cicilan atau pengembalian kredit dari anggota peminjam yang berisikan: (i) tanggal; (ii) pengembalian pokok; (iii) bunga; (iv) denda; (v) jumlah pembayaran; dan (vi) sisa hutang. Selain kegiatan peminjaman kredit, pada KSU Subak Kedua juga memiliki kegiatan ekonomis yang berupa tabungan dan deposito bagi anggotanya. Sebagai suatu koperasi, setiap tahun KSU Subak Kedua menyusun neraca dibawah bimbingan dari Dinas Koperasi dan PKM sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada seluruh anggota koperasi.

Subak Kedua hingga saat ini melakukan kemitraan usaha dengan institusi lain dalam upaya untuk pengembangan bisnis di tingkat subak. Institusi tersebut adalah PT Pertani dan PT Bank Pembangunan Daerah (BPD). Dengan PT Pertani, Subak Kedua mengadakan kemitraan untuk pengadaan sarana produksi padi seperti benih, pupuk dan pestisida. Sedangkan kemitraan usaha yang dilakukan BPD adalah untuk penyediaan kredit yang dimanfaatkan dalam unit usaha simpan pinjam di KSU Subak Kedua.

Dalam pengembangan kemitraan ini, Subak Kedua difasilitasi oleh Pemerintah Kota Denpasar, yaitu dari Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura dan Dinas Koperasi dan PKM. Selain kemitraan usaha dalam penyediaan sarana produksi dan kredit, institusi-institusi tersebut juga memberikan pembinaan untuk penguatan kapasitas pengurus subak dan pengurus koperasi serta manajernya termasuk unit-unit lainnya, terutama dalam aspek manajemen, administrasi dan keuangan. Kemitraan dengan BPD telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi KSU Subak Kedua karena adanya pencairan kredit sebagai tambahan modal usaha KSU Subak Kedua yang besarnya lebih dari Rp 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah).

Pada dasarnya *social capital* terdiri dari tiga dimensi utama yaitu kepercayaan (*trust*), norma (*norm*), dan jaringan sosial (*social network*). Pada tulisan ini, ketiga komponen modal sosial tersebut akan diuraikan sehubungan dengan kegiatan agribisnis pada Subak Kedua. Secara skematis dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2  
Modal sosial dalam kegiatan ekonomis pada koperasi subak

Berdasarkan pada kondisi yang ada pada Subak Kedua memberikan indikasi bahwa melalui *trust*, para petani anggota koperasi dan subak dapat bekerjasama secara lebih efektif. Hal ini disebabkan oleh adanya kesediaan di antara mereka untuk menempatkan kepentingan kelompoknya di atas kepentingan individu. Sebagai salah satu unsur modal sosial, adanya *trust* di antara para petani dapat menjadi sumber energi kolektif subak untuk membangun institusi-institusi di dalamnya guna mewujudkan tercapainya tujuan-tujuan setiap kegiatan agribisnis Subak Kedua. Adanya tindakan-tindakan kolektif yang didasari pada rasa saling mempercayai yang tinggi di antara anggota Subak Kedua akan meningkatkan partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam koperasinya, seperti kegiatan agribisnis yang telah disebutkan di atas. Rasa percaya yang tinggi di antara para petani akan memunculkan adanya kecenderungan yang tinggi untuk terwujudnya hubungan-hubungan sosial yang positif seperti adanya kerjasama untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka. Hal ini sangat mendukung apa yang diungkapkan oleh Cox (1995) mengenai *trust* itu sendiri yaitu *we expect others to manifest goodwill, we trust our fellow human beings. We tend to work cooperatively, to collaborate with others in collegial relationship.*

Pada Subak Kedua, interaksi antar petani baik dalam kegiatan sosial, teknis (irigasi dan pertanian) serta ekonomis adalah didasarkan pada perasaan yakin (*sense of confidence*) bahwa di antara mereka akan saling memberikan tanggapan sebagaimana yang diharapkan olehnya dan selanjutnya mereka saling mendukung. Oleh karena itu, mereka merasakan adanya rasa aman di dalam berinteraksi untuk mengembangkan kegiatan agribisnis melalui Subak Kedua. Ikatan moral kepercayaan sosial sangat memberikan andil bagi kelancaran kegiatan-kegiatan agribisnis yang dilakukan Subak Kedua karena kepercayaan sosial ini sekaligus mendukung norma-norma atau aturan-aturan yang disepakati dan diberlakukan dalam Subak Kedua. Diantara para petani telah terbentuk adanya kejujuran sebagai salah satu unsur dari kepercayaan yang berhubungan dengan ketulusan dan keadaan yang

sebenarnya, sehingga mereka akan selalu mematuhi segala ketentuan yang diberlakukan dalam aktivitas agribisnis ini, seperti pemberian kredit untuk ternak, usahatani padi dan kredit usaha mandiri.

Komponen *trust* ini terlihat pada penyaluran kredit kepada anggota subak dalam jangka waktu tertentu seperti 10 bulan, dimana tingkat bunga yang diberlakukan adalah sebesar sesuai dengan kesepakatan. *Trust* lainnya terlihat pada kegiatan usahatani padi di lahan sawahnya, dimana KSU memberikan fasilitasi untuk pengadaan kebutuhan input produksi pertanian seperti bibit, pupuk dan obat-obatan, teknologi guna mendorong petani untuk dapat melakukan pengelolaan usahatannya lebih efisien dan efektif. Kepercayaan pada anggota ditunjukkan dengan tanpa adanya agunan yang harus diserahkan kepada subak, tetapi pada KSDU diperlukan adanya agunan.

Norma sosial merupakan sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas (kelompok) tertentu. Norma-norma ini terinstitusionalisasi dan mengandung sanksi sosial yang dapat mencegah individu berbuat sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Aturan-aturan tersebut biasanya tidak tertulis, akan tetapi dipahami oleh setiap anggota masyarakatnya dan menentukan pola tingkah laku yang diharapkan dalam konteks hubungan sosial. Aturan-aturan kolektif itu misalnya menghormati pendapat orang lain, tidak mencurangi orang lain, kebersamaan dan lainnya. Di tingkat subak, Subak Kedua telah memiliki berbagai aturan yang dikenal dengan sebutan awig-awig yang mengatur tentang kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan Tri Hita Karana (manajemen dan kerorganisasian, pengelolaan usahatani dan irigasi, penyelenggaraan ritual subak, dan yang terkait). Sementara itu, Subak Kedua memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) yang mengatur pengelolaan koperasi dan telah berbadan hukum.

Jaringan sosial merupakan salah satu dimensi modal sosial selain kepercayaan dan norma. Dalam aspek jaringan sosial, dapat digambarkan bahwa ikatan antar simpul (para petani dan Subak Kedua), dimana ikatan atau hubungan sosial ini sangat ditentukan juga oleh adanya rasa saling percaya (*trust*) di antara para petani dan diatur berdasarkan pada norma-norma yang ada seperti awig-awig serta Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga subak. Berkenaan dengan konsep jaringan sosial ini, terdapat komponen kerja yang selanjutnya diwujudkan dalam bentuk kerjasama. Dalam hubungannya dengan sistem jaringan sosial pada Subak Kedua terlihat adanya keterkaitan (*connectedness*), jaringan (*networks*) dan suasana kelompok. Keterkaitan yang terwujud adalah setiap anggota senantiasa selalu mengadakan interaksi baik di tingkat subak maupun tempek serta Subak Kedua termasuk juga keterkaitan yang bersifat kelembagaan seperti antara subak dengan pihak luar. Hubungan dan interaksi yang terjadi dilandaskan pada norma-norma dan saling percaya di antara mereka, dan memberikan manfaat dalam memenuhi kebutuhannya secara kolektif dalam usahatani seperti perolehan kredit, sarana produksi dan lain sebagainya. Selain itu, dalam jaringan sosial ini juga mengandung komponen partisipasi dan pertukaran timbal balik (*reciprocity*) dan solidaritas di antara mereka yang berinteraksi dengan prinsip keadilan, seperti adil dalam hal distribusi kredit, prosedur, dan sistem.

*Reciprocity* ini merupakan refleksi dari tingkat kepedulian sosial yang tinggi, saling membantu dan saling memperhatikan. Pada masyarakat yang demikian ini berbagai problem sosial akan dapat diminimalkan dan masyarakat akan lebih mudah membangun diri, kelompok, lingkungan sosial serta fisik. Pada Subak Kedua ini, *reciprocity* tercemrin dari adanya sikap saling menghargai dan saling berbagi di antara para anggota. Sebagai

ilustrasi, pada pengelolaan irigasi sebagai pendukung kegiatan pengelolaan usahatani, hubungan timbal balik terlihat pada adanya saling pinjam air irigasi dan juga adanya pengaturan air irigasi secara bergilir.

Solidaritas sosial yang ditunjukkan oleh para petani merupakan suatu keadaan hubungan di antara mereka yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama sejak dahulu (sebelum terbentuknya KSU Subak Kedua). Solidaritas antar petani juga tercermin pada pengelolaan irigasi dan pengelolaan usahatannya, terutama pada saat musim kemarau. Bentuk solidaritas tersebut adalah adanya distribusi dan alokasi air irigasi yang disepakati secara bersama.

#### 4. PENUTUP

##### Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. (1) Koperasi Serba Usaha Subak Kedua beranggotakan 61 orang anggota. Kegiatan-kegiatan ekonomis subak yang dilakukan adalah (i) penyediaan sarana produksi; (ii) pinjaman kredit kepada anggota; (iii) pembentukan koperasi tani; dan (iv) kemitraan usaha dengan pihak lain. (2) Elemen-elemen modal sosial pada Subak Kedua terdiri dari tiga dimensi utama yaitu kepercayaan (*trust*), norma (*norm*), dan jaringan sosial (*social network*). Rasa saling percaya di antara anggota subak terlihat pada pengelolaan irigasi (distribusi dan alokasi air irigasi) dan kegiatan bisnis di tingkat subak. Norma-norma yang dimiliki subak telah ditetapkan dalam awig-awignya. Subak Kedua juga memiliki jaringan sosial dengan pihak lain dalam pengelolaan irigasinya dan kegiatan-kegiatan ekonomis subak.

##### Saran

Memperhatikan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut. (1) Diperlukan adanya pembinaan yang semakin intensif dalam pengembangan agribisnis di tingkat subak. Pembinaan-pembinaan dilakukan dalam aspek praktis mengenai manajemen, administrasi dan usaha-usaha bisnis yang menguntungkan bagi petani dan lembaga subak; (2) Dalam upaya untuk meningkatkan volume usaha bisnis di unit koperasinya, maka diperlukan adanya tambahan modal usaha bagi koperasi sehingga para anggota dapat memperoleh kredit yang lebih tinggi. Penyediaan modal usaha ini dapat diberikan dalam bentuk *grant* atau *loan* dengan bunga yang rendah, dimana subak dan koperasi perlu juga didampingi oleh petugas dari pemerintah atau dari pihak universitas.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, B. 2004. Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Coleman. 1999. *Social Capital in the Creation of Human Capital*. Cambridge Mass: Harvard
- Chambers, R.. 1983. *Pembangunan Desa, Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES
- Elizabeth, R. 2007. Partisipasi sebagai Strategi Pemberdayaan Petani Miskin melalui Program Integrasi Jagung dan Ternak. [http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/\(8\)%20soca-roosgandha-integrasi%20jagung-ternak\(1\).pdf](http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/(8)%20soca-roosgandha-integrasi%20jagung-ternak(1).pdf)
- Elizabeth, R dan Iwan S A. 2009. Sistem Kelembagaan Komunitas Petani Sayuran di Desa Baturiti, Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. [http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/MKP\\_B6.pdf](http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/MKP_B6.pdf)
- Fatah, L. 2006. *Dinamika Pembangunan Pertanian dan Pedesaan*. Banjarbaru: Pustaka Banua.
- Korten, David C.1987. *Community Management, Connecticut* : Kumarian Press, Westaharford.

- Kuswanto. 1997. Penyesuaian Kelembagaan P3A: Belajar dari Pengalaman Pengembangan Usaha Ekonomi P3A di Kabupaten Nganjuk. Padang: PSI-UDLP, UNAND.
- Mubyarto. 1995. Pengantar Ekonomi Pertanian. Jakarta: LP3ES.
- Mosher, AT. 1966. *Getting Agriculture Moving*. Dalam Krisnandhi dan Bahrin Samad. Penyadur. Menggerakkan dan Membangun Pertanian. Jakarta: PT Yasaguna.
- Pranadji, T. 2003. Reformasi Kelembagaan dan Kemandirian Perekonomian Perdesaan: Kajian Pada Kasus Agribisnis Padi Sawah. Makalah yang Disampaikan pada Seminar Nasional "Peluang Indonesia untuk Mencukupi Sendiri Beras Nasionalnya" Badan Penelitian dan Pengembangan Deptan RI, 2 Oktober 2003.
- Putnam, R.D. 1992. *The Prosperous Community: Social Capital and Public Life*. *American Prospect*, 13, Spring, 35- 42. Dalam Elinor Ostrom and T.K. Ahn. 2003. *Foundation of Social Capital*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited.
- Rachman, B. 2009. Kebijakan Sistem Kelembagaan Pengelolaan Irigasi: Kasus Provinsi Banten. Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 07 No. 1. Tahun 2009 <http://www.pse.litbang.deptan.go.id/indpdf/filesART7-1a.pdf>
- Haritz Intan dan Said, E Gumbira. 2004. Manajemen Agribisnis. Yakarta: Ghalia Indonesia.
- Sedana, Gede. 2005. Masalah dan Tantangan Subak dalam Pembangunan Pertanian di Masa Mendatang. Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi. Dalam Pitana dan Setiawan AP. editor. Revitalisasi Subak dalam Memasuki Era Globalisasi. Yogyakarta: Andi
- Shah, P. and M.K. Shah., 1994. "Multifunction Irrigation Organisations: Advantage or Handicap". *Irrigation Managemnt Network, Network Paper No.28, April 1994*.Londdon: Overseas Development Institute. **Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat, Unila, 2008**
- Simatupang, P. 2002. Reformasi Agraria Menuju Pertanian Berkelanjutan: Komentor Terhadap Makalah Profesor Mubyarto. Jurnal Ekonomi Rakyat. Artikel - Th. I - No. 8 - Oktober 2002]
- Soekartawi (1995). Pembangunan Pertanian. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Subejo. 2004. Peranan Social Capital dalam Pembangunan Ekonomi: Suatu Pengantar untuk Studi Social Capital di Perdesaan Indonesia. *Agro Ekonomi Vol. 11 No.1 Juni 2004*.
- Sutawan, Nyoman. 2005. Subak Menghadapi Tantangan Globalisasi. Dalam Pitana dan Setiawan AP. editor. Revitalisasi Subak dalam Memasuki Era Globalisasi. Yogyakarta: Andi
- Sutawan, N., M. Swara, W. Windia, W. Suteja, W. Sudana dan K. Suamba, 1995. Penerimaan dan Pengeluaran Organisasi Subak dan Subak-gede di Lingkungan Subak-agung Yeh Ho, Kabupaten Tabanan dan Subak-agung Gangga Luhur, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali. Denpasar: Universitas Udayana. Mimeo.
- Syahyuti (2007). "Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sebagai Kelembagaan Ekonomi Di Perdesaan. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 5 No. 1, Maret 2007
- Syahyuti. 2008. Peran Modal Sosial (Social Capital) dalam Perdagangan Hasil Pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 26 No. 1, Juli 2008*.